

Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024 Di Kabupaten Sidoarjo

Maria Degly Angelia Wea Raro¹, Agus Muljanto²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: mariadegly2704@gmail.com¹, agusmuljanto@gmail.com²

Article History:

Received: 17 Januari 2025

Revised: 28 Januari 2025

Accepted: 02 Februari 2025

Keywords: Digitalisasi Pemilu, SiRekap, Pilkada 2024, Rekapitulasi Suara, Transparansi Pemilu, Teknologi Informasi, Kabupaten Sidoarjo.

Abstract: Pemanfaatan teknologi dalam proses pemilu menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi demokrasi di Indonesia. Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SiRekap) dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian dari digitalisasi pemilu. Penelitian ini menganalisis implementasi aplikasi SiRekap dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SiRekap telah membantu mempercepat proses rekapitulasi suara dan meningkatkan transparansi pemilu. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta isu keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pelatihan petugas pemilu, optimalisasi infrastruktur teknologi, serta penguatan regulasi terkait keamanan dan keandalan aplikasi SiRekap. Dengan mengatasi tantangan tersebut, penggunaan SiRekap di masa depan diharapkan dapat semakin memperkuat integritas dan akuntabilitas proses pemilu di Indonesia.

PENDAHULUAN

Digitalisasi dalam proses pemilu memiliki peran yang sangat penting di Indonesia, terutama dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan demokrasi. Dengan menggunakan teknologi digital, seperti aplikasi e-rekapitulasi (misalnya SiRekap), proses penghitungan suara dapat dilakukan secara lebih terbuka, sehingga data hasil pemilu dapat diakses langsung oleh publik dan meminimalkan potensi manipulasi. Selain itu, digitalisasi membantu mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam penghitungan suara melalui sistem otomatis yang lebih terstruktur. Proses rekapitulasi yang sebelumnya memakan waktu lama juga dapat diselesaikan lebih cepat dengan teknologi, sehingga lebih efisien.

Sebagai negara kepulauan, digitalisasi sangat membantu Indonesia dalam menjangkau daerah-daerah terpencil, di mana data pemilu dapat dikirim dan diproses dengan lebih mudah dibandingkan metode manual. Meskipun implementasi awal teknologi membutuhkan investasi, dalam jangka panjang digitalisasi dapat mengurangi biaya operasional, seperti distribusi kertas

.....

suara dan dokumen fisik lainnya. Teknologi digital juga memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi pemilu secara real-time, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam mengawasi jalannya pemilu.

Salah satu inovasi yang mencerminkan digitalisasi dalam pemilu adalah aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SiRekap). Aplikasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian dari upaya modernisasi dalam proses rekapitulasi suara. SiRekap berfungsi untuk merekam, memproses, dan mengirim hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara digital ke pusat data. Proses ini tidak hanya memastikan hasil pemilu dapat diakses secara real-time oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat umum, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Selain itu, aplikasi ini dirancang untuk meminimalkan potensi kesalahan manusia dalam rekapitulasi manual, seperti kesalahan penjumlahan atau pencatatan data, sehingga dapat mempercepat proses rekapitulasi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

Penerapan SiRekap pada pemilu tahun 2020 lalu telah berhasil mengadirkan transparansi hasil pemilu bagi masyarakat, untuk itu komisi pemilihan umum pun terus berkomitmen dan berbenah memperbaiki aplikasi sirekap untuk dapat menunjang pemilu dan pilkada di tahun 2024 ini (Humas KPU, 2021). Penerapan SiRekap juga memiliki dasar hukum yang kuat, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini mengamanatkan pentingnya modernisasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, regulasi teknis terkait penggunaan SiRekap dijelaskan dalam sejumlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), seperti PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam kondisi khusus termasuk penggunaan teknologi digital. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggara pemilu untuk menggunakan aplikasi SiRekap sebagai alat rekapitulasi elektronik.

Namun, implementasi aplikasi SiRekap menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesiapan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, keamanan data untuk mencegah serangan siber, serta perlunya sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pemilu dan masyarakat agar mampu menggunakan teknologi ini dengan baik. Pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem E-Rekap (Sirekap) dengan tujuan tidak hanya meningkatkan transparansi dalam Pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Upaya ini dilakukan dengan menggandakan jumlah petugas pemilu (KPPS) pada tahun 2024. Meskipun jumlah tenaga kerja meningkat, kebijakan ini berdampak pada penyesuaian upah KPPS. Dengan implementasi Sirekap, diharapkan proses pemilu dapat berjalan lebih efisien, transparan, serta memberikan peluang kerja bagi lebih banyak orang, sekaligus memastikan bahwa beban kerja petugas tetap terjaga pada tingkat yang wajar (Nurazizah Hidayat et al., n.d.).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi aplikasi SiRekap di Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu inovasi digital dalam proses rekapitulasi suara pada pemilu. Fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan aplikasi SiRekap di Kabupaten Sidoarjo, termasuk bagaimana teknologi ini diintegrasikan dalam setiap tahapan rekapitulasi suara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam mengimplementasikan aplikasi ini, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, serta kendala-kendala teknis lainnya. Tidak hanya itu, penelitian ini juga berupaya untuk menilai dampak penggunaan SiRekap terhadap transparansi dan akurasi pemilu, dengan melihat sejauh mana aplikasi ini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu serta meminimalkan potensi kesalahan atau manipulasi data. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat pemanfaatan teknologi digital

dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat daerah seperti Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara untuk memperoleh data dengan tujuan dan penggunaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat empat komponen penting dalam setiap penelitian yaitu data, tujuan, penggunaan dan prosedur ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi aplikasi SiRekap dalam proses rekapitulasi suara pada pemilu di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan subjek penelitian yang terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk petugas pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam dengan petugas pemilu dan juga anggota Komisi Pemilihan Umum yang menjadi admin aplikasi web SiRekap untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi SiRekap, observasi partisipatif pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi di beberapa TPS, serta pengumpulan data sekunder melalui dokumen resmi dan laporan Komisi Pemilihan Umum.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi transkripsi wawancara, pengkodean data berdasarkan tema-tema yang muncul, penyusunan tema yang relevan, dan interpretasi data untuk menarik kesimpulan mengenai implementasi aplikasi SiRekap. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, serta member checking untuk meminta umpan balik dari informan mengenai temuan awal. Penelitian ini juga akan mematuhi prinsip-prinsip etika, termasuk mendapatkan izin dari pihak-pihak yang terlibat, menjaga kerahasiaan identitas informan, dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan penelitian. Dengan metode penelitian yang sistematis dan terencana, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami implementasi aplikasi SiRekap dan dampaknya terhadap proses pemilu di Kabupaten Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino,2020:146),mengatakan bahwa : Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Berikut ini faktor- faktor yang mempengaruhi suatu implementasi menurut Van Metter dan Van Horn :

Kualitas Kebijakan

Kebijakan yang baik harus dirancang dengan jelas, komprehensif, dan mampu diimplementasikan secara efektif. Kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi yang mengaturnya, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjawab tantangan di lapangan, seperti aspek teknis, kesiapan sumber daya, serta akuntabilitas dalam proses pemilu. Dalam konteks Sirekap, kualitas kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan digitalisasi rekapitulasi suara dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Untuk itu, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai sejauh mana kebijakan ini telah memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Kebijakan yang mendasari penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SiRekap) cukup jelas dalam hal tujuan untuk mempercepat rekapitulasi suara dan meningkatkan transparansi pemilu. SiRekap diperkenalkan sebagai bagian dari upaya modernisasi pemilu di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, meskipun ada landasan hukum yang kuat, regulasi yang secara eksplisit mengatur digitalisasi proses pemilu masih perlu diperjelas, terutama dalam peraturan KPU. Misalnya, dalam Peraturan KPU, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur penggunaan teknologi, tetapi tidak semua aspek teknis dan prosedural terkait SiRekap diuraikan secara mendetail, yang dapat menyebabkan kebingungan di lapangan mengenai bagaimana aplikasi harus digunakan dan diintegrasikan dalam proses pemilu (PKPU Nomor 18 Tahun 2020).

Dari segi teknis dan keamanan, meskipun SiRekap dirancang untuk meningkatkan efisiensi, sistem ini belum sepenuhnya terbuka dalam menjelaskan mekanisme keamanan dan mitigasi risiko. Keamanan data adalah isu yang sangat penting, terutama dalam konteks pemilu, di mana potensi manipulasi data dapat merusak integritas proses demokrasi. Menurut penelitian oleh Albrecht et al. (2019), transparansi dalam mekanisme keamanan sistem pemilu digital sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, perlu adanya pengujian menyeluruh serta audit independen untuk memastikan keandalan dan perlindungan data. Audit independen dapat membantu mengidentifikasi potensi kerentanan dalam sistem dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pemilu merupakan aspek penting dalam implementasi SiRekap. KPU telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan petugas di lapangan. Menurut laporan dari KPU, meskipun pelatihan telah dilakukan, masih terdapat variasi dalam pemahaman dan keterampilan petugas di berbagai daerah. Di daerah dengan keterbatasan akses teknologi, kebijakan terkait pelatihan dan dukungan teknis bagi pengguna masih perlu diperkuat. Pelatihan yang tidak memadai dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan teknologi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Dalam hal mitigasi kendala teknis, belum ada mekanisme yang sangat jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi gangguan sistem saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting, mengingat gangguan teknis dapat mengakibatkan penundaan dalam proses pemungutan suara dan rekapitulasi. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih rinci mengenai prosedur cadangan jika aplikasi mengalami kendala atau jika terjadi potensi manipulasi data digital. Memiliki rencana cadangan yang jelas dapat membantu mengurangi dampak dari gangguan teknis.

Dari segi akuntabilitas dan pengawasan, kebijakan terkait peran pihak independen seperti Bawaslu dan masyarakat sipil dalam mengawasi penggunaan SiRekap masih memerlukan kejelasan lebih lanjut. Regulasi yang lebih tegas tentang bagaimana data yang dihasilkan oleh SiRekap dapat diverifikasi dan diuji akurasinya juga perlu diperkuat. Penelitian oleh Norris (2018) menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif oleh pihak independen dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Secara keseluruhan, kebijakan dasar penggunaan SiRekap cukup jelas dalam hal tujuan dan manfaatnya, tetapi aspek teknis, keamanan, serta pengawasan perlu lebih diperinci agar implementasi sistem ini dapat berjalan lebih efektif dan terpercaya.

Sumber Daya

Definisi sumber daya juga memperhitungkan dua faktor lain yaitu faktor kelembagaan yang menentukan siapa yang akan menguasai sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan, serta

faktor teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya digunakan. Dalam hal ini sumber daya mengacu pada manfaat atau kegunaan seiring berjalannya zaman (Nurazizah Hidayat et al., n.d.). Ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SiRekap) di Kabupaten Sidoarjo.

Dari segi sumber daya manusia, petugas pemilu diharapkan memiliki pemahaman teknis yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi ini. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi dan pelatihan, efektivitas pelatihan tersebut masih bervariasi. Beberapa petugas mengalami kesulitan dalam memahami proses input dan pengelolaan data digital, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman yang dapat berdampak pada akurasi dan efisiensi penggunaan SiRekap. Pelatihan yang tidak memadai dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan teknologi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Selain itu, intensitas dan cakupan pelatihan yang dilakukan oleh KPU masih terbatas. Sebagian besar materi pelatihan bersifat teoritis dan kurang memberikan simulasi praktik yang mendekati kondisi sebenarnya di lapangan. Misalnya, jika pelatihan hanya dilakukan dalam bentuk presentasi tanpa adanya praktik langsung, petugas mungkin tidak siap menghadapi situasi nyata saat menggunakan aplikasi di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan saat mereka harus melakukan input data secara real-time, yang sangat penting dalam konteks pemilu.

Dari aspek teknologi, keberhasilan SiRekap sangat bergantung pada infrastruktur yang tersedia, terutama akses internet dan perangkat yang digunakan. Salah satu kendala utama adalah konektivitas internet yang belum merata di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Jaringan yang tidak stabil dapat menghambat proses pengiriman data secara real-time, yang merupakan salah satu fitur utama dari SiRekap. Infrastruktur teknologi yang buruk dapat mengganggu pelaksanaan pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap hasilnya. Misalnya, jika petugas di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses internet, mereka mungkin tidak dapat mengirimkan data hasil pemungutan suara tepat waktu, yang dapat menyebabkan penundaan dalam proses rekapitulasi.

Selain itu, perangkat yang digunakan oleh petugas bervariasi dalam hal spesifikasi dan kualitas. Perbedaan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam kecepatan serta akurasi input data. Misalnya, jika beberapa petugas menggunakan perangkat yang lebih tua atau kurang canggih, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SiRekap dengan efisien. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa setiap tahapan rekapitulasi suara dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis yang signifikan.

Pada Pilkada 2024 yang berlangsung pada bulan November, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap) di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kemajuan yang cukup positif, meskipun juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk petugas pemilu dengan tujuan memastikan mereka memahami cara mengoperasikan SiRekap dengan baik. Namun, efektivitas pelatihan tersebut bervariasi, terutama karena latar belakang teknis petugas yang tidak seragam. Beberapa petugas mengalami kesulitan dalam memahami proses input dan pengelolaan data secara digital, yang dapat berpengaruh pada keakuratan dan kelancaran penggunaan aplikasi. Dari segi teknologi, uji coba SiRekap bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengungkapkan adanya beberapa kendala teknis. Salah satu masalah utama yang muncul adalah penurunan kinerja server SiRekap saat terjadi lonjakan akses yang bersamaan, yang menyebabkan aplikasi menjadi lambat dan petugas kesulitan untuk login. Masalah ini menandakan bahwa infrastruktur teknologi,

termasuk kapasitas server dan kestabilan jaringan internet, masih perlu ditingkatkan agar aplikasi dapat berfungsi secara maksimal.

Selain itu, dukungan teknis bagi petugas di lapangan juga menjadi salah satu perhatian utama. Kecepatan dan efektivitas respons teknis sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul selama proses rekapitulasi suara. Namun, sistem dukungan yang ada saat ini masih memerlukan perbaikan agar masalah teknis dapat diselesaikan dengan segera tanpa menghambat jalannya proses pemilu. Secara keseluruhan, meskipun implementasi SiRekap di Kabupaten Sidoarjo pada Pilkada 2024 telah membawa dampak positif dalam hal efisiensi dan transparansi, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Peningkatan kualitas pelatihan untuk petugas pemilu, investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi, serta perbaikan sistem dukungan teknis menjadi langkah penting untuk memastikan aplikasi SiRekap dapat berfungsi secara optimal, sehingga mendukung proses demokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Komunikasi

Untuk membentuk dan mensukseskan suatu kebijakan komunikasi merupakan kunci penting dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan tersebut. Ketika komunikasi dua arah berlangsung dan makna yang distimulasikan sama dengan apa yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan, maka manusia atau komunikan harus mampu menerapkan pengetahuan secara kreatif agar dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif (Nurazizah Hidayat et al., n.d.). Pada penerapannya komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), petugas pemilu, dan masyarakat terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi. KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan pelatihan dan sosialisasi untuk petugas pemilu dengan tujuan memastikan pemahaman yang baik tentang penggunaan aplikasi SiRekap. Namun, efektivitas komunikasi ini tampak bervariasi. Meskipun pelatihan telah dilakukan, sejumlah petugas pemilu mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi, terutama karena latar belakang teknis yang berbeda-beda di antara petugas. Beberapa petugas yang tidak terbiasa dengan teknologi digital merasa kesulitan dalam memahami proses input data dan pengelolaan informasi secara digital, yang dapat memengaruhi kecepatan dan akurasi penggunaan aplikasi. Pelatihan yang tidak memadai dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan teknologi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih personal atau metode pelatihan yang lebih mendalam, seperti sesi pelatihan berulang atau penggunaan bahan pelatihan yang lebih visual dan mudah dipahami.

Di sisi lain, komunikasi kepada masyarakat juga sangat penting, karena SiRekap bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses pemilu. Meskipun beberapa informasi terkait SiRekap disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial dan website resmi KPU, tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana aplikasi ini bekerja dan dampaknya terhadap proses pemilu. Sebagai contoh, di beberapa daerah, masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau tidak terbiasa menggunakan media sosial, sehingga mereka tidak menerima informasi yang diperlukan. Penyuluhan atau kampanye publik yang lebih intensif di tingkat desa atau kecamatan mungkin diperlukan untuk menjangkau masyarakat secara lebih menyeluruh. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami tujuan dari aplikasi, tetapi juga merasa lebih percaya terhadap sistem digital yang digunakan untuk rekapitulasi suara. Kurangnya komunikasi yang memadai dapat menimbulkan kebingungan atau ketidakpercayaan terhadap integritas hasil pemilu yang diolah melalui SiRekap.

Ketidakjelasan dalam penyampaian informasi mempengaruhi pemahaman dan penerimaan

aplikasi oleh kedua pihak, baik petugas pemilu maupun masyarakat. Petugas pemilu yang tidak sepenuhnya memahami cara menggunakan aplikasi berisiko membuat kesalahan dalam proses input data, yang tentunya berpotensi merusak akurasi hasil rekapitulasi suara. Sebagai contoh, jika petugas tidak memahami cara memasukkan data dengan benar, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam jumlah suara yang dilaporkan. Sementara itu, ketidakjelasan informasi bagi masyarakat bisa menyebabkan ketidakpercayaan terhadap transparansi dan validitas data pemilu. Untuk menghindari hal ini, komunikasi yang lebih terstruktur dan terorganisir sangat dibutuhkan, seperti penyediaan materi pelatihan yang lebih sesuai dengan tingkat pemahaman petugas, serta kampanye yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperkenalkan SiRekap dengan cara yang mudah dipahami. Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya untuk menyampaikan informasi mengenai SiRekap, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal efektivitas komunikasi. Peningkatan kualitas pelatihan untuk petugas pemilu dan komunikasi yang lebih jelas dan menyeluruh kepada masyarakat menjadi langkah penting agar SiRekap dapat diterima dan digunakan dengan baik, serta untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam proses pemilu. Dengan memperbaiki aspek-aspek komunikasi ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat meningkat, dan hasil pemilu dapat diterima dengan lebih baik oleh semua pihak.

Struktur Birokrasi

Dalam rangka persiapan Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap). Salah satu langkah penting yang diambil adalah mengadakan sosialisasi penggunaan SiRekap, yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai hasil pemilu dapat diakses dengan cepat dan akurat oleh publik). Meskipun upaya sosialisasi ini menunjukkan hasil yang positif, tantangan dalam implementasi SiRekap tetap ada, seperti kendala teknis dan kebutuhan akan pelatihan tambahan bagi petugas pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KPU Sidoarjo telah berupaya keras untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses ini, masih ada ruang untuk perbaikan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam sosialisasi dan pelatihan yang lebih mendalam agar semua pihak yang terlibat dapat memahami dan menggunakan aplikasi SiRekap secara efektif. Namun berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang saya lakukan baik dari tingkat staf KPU, anggota PPK maupun PPS sudah cukup baik dalam mengolah dan menjalankan pokok pokok tugas mereka masing-masing, namun kendati demikian masih terdapat kesalahan dalam segi penguploadan hasil ke web sirekap maupun kendala aplikasi lainnya. Faktornya pun beragam dimulai dari kelelahan, adanya kesenjangan usia yang menyebabkan kurang melek akan dunia digital sehingga tidak tahu bagaimana mengoperasikan aplikasi tersebut, masalah website yang down, sinyal dll. Dengan demikian, meskipun KPU Kabupaten Sidoarjo telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mempersiapkan Pilkada 2024, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa implementasi SiRekap dapat berjalan dengan optimal.

Tantangan dan Solusi

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap) pada Pilkada 2024 menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi proses rekapitulasi suara. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah koneksi internet yang tidak stabil, terutama di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengunggah data hasil pemungutan suara secara tepat waktu, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan

keterlambatan dalam pengumuman hasil pemilu (KPU Sidoarjo, 2023). Selain itu, masalah teknis pada perangkat, seperti ketidaksesuaian antara perangkat keras dan perangkat lunak dengan aplikasi SiRekap, juga menjadi hambatan yang signifikan. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan aplikasi tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengganggu kelancaran proses rekapitulasi suara.

Kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas pemungutan suara juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Banyak petugas yang belum sepenuhnya memahami cara menggunakan aplikasi SiRekap, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam penginputan data dan mengurangi akurasi hasil pemilu (Afika et al., 2024). Selain itu, kekhawatiran terkait keamanan data dan sistem juga muncul, mengingat potensi peretasan atau manipulasi data yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Keamanan data menjadi isu krusial, terutama dalam konteks pemilu yang sangat bergantung pada integritas informasi yang disajikan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa solusi telah diusulkan. Pertama, peningkatan infrastruktur teknologi sangat penting, termasuk memastikan stabilitas koneksi internet di seluruh wilayah. Penyediaan perangkat penguat sinyal di daerah terpencil dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah koneksi yang tidak stabil. Selain itu, pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi petugas pemilu sangat diperlukan agar mereka lebih terampil dalam mengoperasikan aplikasi SiRekap dan dapat menangani kendala teknis yang mungkin terjadi. Pelatihan ini harus mencakup simulasi penggunaan aplikasi dalam situasi nyata, sehingga petugas dapat lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi saat pemungutan suara.

Dari sisi keamanan, penerapan protokol enkripsi data dan autentikasi multi-faktor menjadi langkah penting untuk mencegah peretasan serta kebocoran data. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi data pemilih, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Selain itu, penyediaan protokol darurat sangat diperlukan sebagai langkah antisipasi jika terjadi kegagalan teknis, sehingga rekapitulasi suara tetap dapat dilakukan dengan sistem manual sebagai cadangan. Protokol ini harus dirancang dengan baik agar dapat diimplementasikan dengan cepat dan efisien dalam situasi darurat.

Tak kalah penting, sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan SiRekap perlu ditingkatkan. Masyarakat yang memahami cara kerja aplikasi ini akan lebih percaya terhadap transparansi dan akurasi hasil pemilu. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi SiRekap dalam pemilu mendatang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap implementasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi dalam pemilu membawa dampak positif yang signifikan terhadap transparansi, efisiensi, dan akurasi rekapitulasi suara. Digitalisasi memungkinkan proses pengumpulan dan pengolahan data hasil pemungutan suara dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sehingga hasil pemilu dapat diumumkan dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari penggunaan SiRekap, yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

Namun, pelaksanaan SiRekap tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung aplikasi ini. Di beberapa daerah, terutama yang terpencil, infrastruktur teknologi yang kurang memadai dapat menghambat proses rekapitulasi suara. Selain itu, koneksi internet yang tidak stabil menjadi masalah serius, karena hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengunggahan data hasil pemungutan suara (Afika et al., 2024). Kesiapan

sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi SiRekap. Banyak petugas pemungutan suara yang belum sepenuhnya terlatih dalam menggunakan aplikasi ini, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam penginputan data dan mengurangi akurasi hasil pemilu. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan bagi petugas pemilu sangat diperlukan agar mereka dapat mengoperasikan aplikasi SiRekap dengan baik dan menangani kendala teknis yang mungkin muncul.

Masalah teknis dan keamanan data juga menjadi perhatian utama. Potensi peretasan atau manipulasi data dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, penerapan protokol keamanan yang lebih ketat, seperti enkripsi data dan autentikasi multi-faktor, sangat penting untuk melindungi integritas data pemilih. Selain itu, penyediaan prosedur cadangan untuk menghadapi kendala teknis, seperti sistem manual untuk rekapitulasi suara, juga perlu dipersiapkan agar proses pemilu tetap dapat berjalan meskipun terjadi masalah teknis. Sosialisasi kepada masyarakat juga merupakan aspek penting dalam implementasi SiRekap. Masyarakat yang memahami cara kerja aplikasi ini akan lebih percaya terhadap transparansi dan akurasi hasil pemilu. Oleh karena itu, KPU perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan SiRekap dan manfaatnya dalam proses pemilu. Dengan mengoptimalkan berbagai aspek tersebut, diharapkan implementasi SiRekap di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia. Langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengatasi tantangan ini akan sangat menentukan keberhasilan digitalisasi dalam pemilu, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Afika, S. N., Darajah, A., Arrohmah, L. L., Anggraini, J. P., & Rahmanto, S. (2024). EFEKTIVITAS SOSIALISASI DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2024 DI KABUPATEN SIDOARJO. *Journal Publicuho*, 7(3), 10041–11053. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.456>
- Agustino, Leo. (2020) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta, Cv.
- Humas KPU. (2021, November 17). *Manfaatkan Sirekap, Transparan dan Kemudahan untuk Masyarakat*.
- Norris, P. (2018). "The Role of Independent Oversight in Electoral Integrity." *Electoral Studies*, 55, 57-66.
- Nurazizah Hidayat, F., Purnamasari, H., Ramdani, R., Aryani Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan, L., & Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, F. (n.d.). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i12.2024>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
-